

BAB I

PENDAHULUAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

A. LATAR-BELAKANG

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩١﴾

*"Dan jika ada dua golongan dari orang – orang mukmin yang berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang orang yang berlaku adil."*¹

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي
 الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا
 وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ
 لَمُسْرِفُونَ ﴿١٧٠﴾

*"Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh oarang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya."*²

Nanggroe Aceh Darussalam adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa serta memiliki kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang rundangan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Secara geografi Nanggroe Aceh Darussalam terletak disebelah Barat pulau Sumatera.

Eka kemerdekaan pada perisnngian 1 Juli 1956 maka batas batas wilayah Nanggroe

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera .
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka, dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.³

Sepanjang sejarah kemerdekaan Negara Republik Indonesia, Aceh merupakan suatu daerah yang tidak pernah henti – hentinya menjadi buah pembicaraan di kalangan masyarakat Indonesia maupun masyarakat Internasional. Jikalau pada awal kemerdekaan NKRI, secara luas Aceh dikenal sebagai tulang punggung perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, maka pada masa – masa sesudah kemerdekaan daerah yang dikenal dengan julukan "*Serambi Mekah*" dan "*Tanah Rencong*" itu lebih banyak dipandang sebagai suatu daerah konflik yang bergejolak secara terus menerus dan hendak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setelah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, sementara di daerah – daerah lain mengalami proses peredaan ketengangan dan konflik dan memulai membangun daerahnya masing-masing, baik itu dibidang ekonomi, pendidikan dan sosial politik. Sementara rakyat Aceh hidup dalam suasana gaduh dan resah. Ketegangan konflik yang terjadi di Aceh antara pemerintah pusat di Jakarta pada awalnya menyangkut peranan Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aceh yang memiliki peranan besar pada masa revolusi kemerdekaan Republik Indonesia dan bahkan dijuluki oleh Presiden Soekarno sebagai " Daerah

³ *Statistik Demografi Aceh*, 07 Juli 2006

Modal ” justru diperkecil peranannya setelah dunia Internasional mengakui kemerdekaan Republik Indonesia dipenghujung tahun 1949. Konflik di Aceh bermula pada saat terjadinya peleburan Provinsi Aceh menjadi bagian dari Propinsi Sumatra Utara pada Tahun 1951.⁴

Perlawanan yang dilakukan masyarakat Aceh bermula pada awal 1953 yang disebut dengan pemberontakan Darul Islam yang dipimpin oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh, yang pada masa revolusi pernah diangkat menjadi Gebenur Meliter Aceh, Langkat dan Tanah Karo. Perlawanan Darul Islam di Aceh berlangsung kurang lebih Sembilan Tahun dan akhirnya mencapai kesepakatan Damai antara pejuang Darul Islam dengan Pemerintah Indonesia pada Tahun 1962, dengan memberi konsesi politik berupa penetapan Aceh sebagai Daerah Istimewa, hal ini dilakukan demi mengakhiri perlawanan yang dilancarkan oleh kelompok Teungku Muhammad Daud Beureueh.⁵

Perdamaian yang dirasakan masyarakat Aceh ternyata tidak berlangsung dengan lama, karena 14 tahun setelah perjanjian damai kelompok Muhammad Daud Beureueh dengan Pemerintah Indonesia, pada 4 Desember 1976 muncul lagi sebuah gerakan perlawanan masyarakat Aceh yang dipimpin oleh Tengku Muhammad Hasan Di Tiro dengan nama Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pada 4 Desember 1976 Tengku Muhammad Hasan Di Tiro mendeklarasikan kemerdekaan Negara Aceh Sumatra yang berbunyi: ” *Kepada rakyat diseluruh dunia : Kami, rakyat Aceh*

⁴ Al-Chaidar “Aceh Bersimbah Darah” KontraS. Jakarta 20 Oktober 1998. hlm. 49

⁵ Majalah Tempo, 14 Agustus 1976, hlm. 21

*Sumatra melaksanakan hak menentukan nasib sendiri, dan melindungi hak sejarah istimewa nenek moyang kami, dengan ini mendeklarasikan bebas dan berdiri sendiri dari semua kontrol politik pemerintah asing Jakarta dan orang asing Jawa. Atas nama rakyat Aceh sumatra yang berdaulah. Tengku Hasan Muhammad Di Tiro. Ketua Nasional Liberation Front of Aceh Sumatra dan Presiden Aceh Sumatra, 4 Desember 1976”.*⁶

Adapun penyebab timbulnya perlawanan yang dipimpin oleh Muhammad Hasan di Tiro sebenarnya tidak berbeda jauh dengan perlawanan yang dilancarkan oleh kelompok Tengku Muhammad Daud Beureueh terhadap Pemerintah Indonesia, yaitu berawal dari kekecewaan terhadap Pemerintah Indonesia yang tidak bersikap adil kepada masyarakat Aceh dan pemerintah yang tak kunjung merealisasikan janji – janji yang pernah disepakati, misalnya tentang kewenangan bagi masyarakat Aceh dalam mengatur Pemerintahannya sendiri serta menerapkan sistem *Syariat Islam* di Daerah Aceh seperti yang pernah dijanjikan pada masa kesepakatan damai pada tahun 1962 antara Pemerintah Indonesia dengan kelompok perjuangan Daud Beureuh.⁷

Pada mulanya perlawanan yang dilancarkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tidak begitu mendapat dukungan luas dari masyarakat Aceh, akan tetapi setelah Pemerintah Indonesia menjadikan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) atau lebih dikenal dengan Operasi Jaring Merah pada Tahun 1989 – 1998, maka dukungan dari masyarakat Aceh meningkat dan mendapat restu dari sebahagian besar

⁶ Ahmad Sudirman. <http://www.dataphone.com>. 28 November 1999.

⁷ Majalah Tempo, *op. cit.* hal 23

masyarakat Aceh dengan perjuangan yang dilakukan oleh GAM. Pemberlakuan DOM di Aceh dan ditambah dengan tindakan aparat keamanan yang tidak manusiawi menyebabkan banyak masyarakat sipil Aceh yang tidak bersalah menjadi korban, maka dengan penuh rasa kekecewaan, sakit hati dan juga diselimuti perasaan dendam untuk membalas tindakan aparat keamanan tersebut, maka dukungan masyarakat Aceh terhadap perjuangan Gerakan Aceh Merdeka merupakan sebagai jalan untuk membalas dendam atas kekejaman Aparat Keamanan Pemerintah Indonesia serta ketidak-adilan yang dirasakan oleh masyarakat Aceh pada saat itu.

Dalam sejarah perlawanan yang dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka terhadap Pemerintah Indonesia yang sudah berjalan selama hampir 30 tahun, dan untuk mengakhiri konflik yang sudah berjalan cukup lama di Aceh tersebut maka pada masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), sudah pernah dilakukan tindakan – tindakan politik untuk menciptakan perdamaian di Aceh dengan *JoU (Join of Understanding)* serta penanda tanggan nota perjanjian gencatan senjata pada 2 Juni 2000 antara Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka. Sayangnya tindakan – tindakan politik tersebut dipatahkan oleh politik kekerasan oleh segelintir pihak yang bangga dengan identitas nasionalisme sempit. Pada akhirnya UU otonomi khusus yang didukung oleh *JoU* dan *Memorandum of Understanding* dikhianati oleh kebijakan – kebijakan Pemerintah Pusat bahkan

diabaikan dengan serangkaian kebijakan Darurat Militer dan Darurat Sipil tahun 2003 pada masa Pemerintahan Presiden Mega Wati Soekarno Putri⁸.

Pasca bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami yang melanda Provinsi Nangroe Aceh Darussalam pada tanggal 26 Desember 2004 yang telah memporak porandakan sebagian besar daerah yang dikenal dengan julukan "*Serambi Mekah*". Dan bencana alam tersebut telah menyebabkan ratusan ribu nyawa masyarakat Aceh menjadi korban dari keganasan bencana alam gempa dan tsunami. Dengan terjadinya bencana Alam Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami yang melanda Aceh pada penghujung Tahun 2004 tersebut banyak menarik simpati dan perhatian dari segala lapisan masyarakat baik Nasional maupun Internasional.

Sehubungan dengan terjadinya musibah bencana alam Gempa dan Tsunami tersebut mengugah kesadaran setiap lapisan masyarakat terutama kelompok yang selama ini bertikai di Aceh, bahwa konflik dan kekerasan di Aceh yang sudah berlangsung selama puluhan tahun harus segera dihentikan. Atas dasar kesadaran inilah yang akhirnya mendorong pihak-pihak yang bertikai di Aceh mengadakan pertemuan untuk membicarakan penyelesaian konflik di Nangroe Aceh Darussalam, yaitu Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka.

Pertemuan antara Pemerintah RI dengan GAM dilaksanakan di Helsinki Finlandia. Sebagai fasilitator pertemuan antara RI dengan GAM itu sendiri adalah Mantan Presiden Finlandia MARTTI AHTISAARI selaku Ketua Dewan Direktur *Crisis Management Initiative*. Hingga akhirnya nota perjanjian damai antara

⁸ *Malayu-Kontes*, 2002, Jakarta, 05 Mei 2003

Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ditanda tangani pada 15 Agustus 2005.

Seiring berjalannya proses perdamaian pasca penanda tanganan Nota Kesepahaman Damai antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka pada 15 Agustus 2005 lalu. Maka untuk membangun perdamaian yang permanen di Aceh, Pemerintah Provinsi Aceh membentuk sebuah lembaga untuk mendukung terwujudnya perdamaian di Aceh sebagaimana Inpres No. 15 tahun 2005.⁹ Adapun lembaga yang dibentuk adalah Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRDA) yang di resmikan pada tanggal 13 April 2006 dengan SK Gubernur NAD No. 330/106/2006. Badan Reintegrasi yang dibentuk Pemerintah Provinsi NAD bertujuan mengreintegrasikan mantan tentara GAM, dan mantan Tapol/Napol yang mendapat amnesti sebagaimana yang termuat dalam nota perjanjian damai tentang reintegrasi kedadalam masyarakat, serta masyarakat yang terkena dampak akibat konflik yang selama ini berlangsung.¹⁰

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Provinsi akan melakukan upaya untuk membantu orang-orang yang terlibat dalam kegiatan GAM guna memperlancar reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Langkah-langkah reintegrasi tersebut diantaranya mencakup pemberian kemudahan ekonomi bagi mantan pasukan GAM,

⁹ Inpres No.15 Tahun 2005. "Agar Gubernur Provinsi NAD merencanakan dan melaksanakan reintegrasi dan pemberdayaan setiap orang yang terlibat dalam GAM ke dalam masyarakat mulai dari : penerimaan, pembekalan, pemulangan ke kampung halaman, dan penyiapan lapangan pekerjaan"

¹⁰ *Setengah Samudra Indonesia*, 02 Maret 2006

tahanan politik yang telah memperoleh amnesti dan masyarakat yang terkena dampak akibat konflik.

Selain itu Reintegrasi merupakan salah satu agenda dari Pemerintah sebagai mana yang telah disepakati dalam Nota Kesepahaman Damai di Helsinki Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005 antara Pemerintah RI dan GAM. Reintegrasi sendiri merupakan proses bagaimana pengambungan kembali para tentara-tentara GAM ke tengah – tengah masyarakat dan para tahanan politik yang mendapat amnesti, serta membangun kembali kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

Bagaimana Peran Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRDA) Dalam Proses Reintegrasi Pasca Perjanjian Damai Antara Pemerintah RI Dengan GAM Pada Tahun 2005.

Berkenaan dengan rumusan masalah diatas maka peneliti mengambil dua Kabupaten sebagai sample (contoh) untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan proses reintegrasi yang selama ini sudah berjalan di Aceh mulai dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 yaitu Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten

C. TUJUAN DAN MANFAT PENELITIAN

Tujuan penelitian ini diharapkan mampu memberikan dan melengkapi informasi tentang variabel-variabel tertentu terhadap kemunculan Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRDA) yang ikut berperan aktif dalam proses mewujudkan perdamaian yang permanen di Nangroe Aceh Darussalam. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRDA) dalam proses reintegrasi pasca perjanjian damai antara Pemerintah RI dan GAM di NAD.
2. Untuk dapat mengetahui program-program yang dijalankan oleh BRDA dalam usaha pemulihan keadaan Aceh pasca perjanjian damai antara Pemerintah RI dan GAM.
3. Dapat membuka wawasan baru, sikap kritis dan menumbuhkan kepedulian sosial pada masalah-masalah penanganan konflik di masyarakat.
4. Untuk dapat mendorong mengaplikasikan disiplin ilmu, dalam kehidupan masyarakat.
5. Untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar keserjanaan dalam Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan spesialisasi Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Mamfaat penelitian ini, diantaranya:

1. Dapat mengembangkan kemampuan penulis secara khusus dan mahasiswa secara umum untuk mengkaji pemasalahan-permasalahan sosial yang terjadi dimasyarakat.
2. Sebagai salah-satu referensi bagi pengembangan penelitian yang sejenis di masa mendatang.
3. Memberikan informasi bagi masyarakat mengenai peran yang dijalankan Badan Reintegrasi Damai Aceh (BDRA) dalam proses pengintegrsian di Aceh.

D. KERANGKA DASAR TEORI

Teori adalah sekumpulan kontruk (konsep), defenisi, dan dalil yang saling terkait yang menghadirkan suatu pandangan yang sistematis tentang fenomena dengan mnetapkan hubungan diantara variabel, dengan maksud menjelaskan dan meramalkan suatu fenomena.¹¹

Menurut Koentjoroningrat teori adalah pernyataan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala-gejala yang diteliti disatu tempat atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat.¹² Sehubungan dengan itu, konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini adalah:

¹¹ James A. Black & Dean J. Champion "Metode dan Masalah Penelitian Sosial" Refika Aditama, Bandung 1999, hlm. 48.

E. Peran

Ada beberapa pengertian tentang peran, diantaranya dikemukakan oleh Jack C. Plano, Robert E. Riggs, dan Hellena S. Robin adalah sebagai berikut: "Seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam suatu kelompok sosial"¹³

Sedangkan menurut Astrid S. Susanto bahwa peranan mengandung tiga hal, yaitu:

- a. peranan adalah meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasinya.
- c. Peranan dapat juga diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.¹⁴

Dalam ilmu antropologi dan ilmu sosial lainnya, peranan diberi arti yang lebih khusus, yaitu peranan khas yang dipentaskan atau ditindakan oleh individu dalam

¹³ Jack C. Plano, Robert E. Riggs, dan Hellena S. Robin. *Kamus Analisis dan Politik*. Rajawali Press. Jakarta. 1998. hlm. 220

kedudukan dimana ia berhadapan dengan individu-individu dalam kedudukan-kedudukan lain.¹⁵

Konsep peranan menurut pengertian ilmiah mengandung kenyataan bahwa si individu dari saat ke saat dapat berpindah dari suatu peranan ke peranan yang lain; bahkan jarak antara satu saat dengan saat yang lain dapat sedemikian dekatnya sehingga seolah-olah tampak sebagai satu saat. Hal ini berarti bahwa seorang individu dapat mementaskan sekaigus dua atau lebih peranan sosial pada satu saat tertentu.

2. Konflik dan Reintegrasi.

Kesepakatan damai adalah merupakan suatu langkah awal untuk menghentikan kekerasan dan konflik dengan melanjutkan penyelesaian masalah yang dapat menimbulkan konflik dengan cara – cara yang damai dan bermatabat.

Ted Robert Gurr, mengemukakan bahwa biasanya konflik dengan menggunakan kekerasan terjadi dalam suatu masyarakat karena adanya rasa kekecewaan (Frustrasi). Frustrasi itu sendiri timbul berkaitan dengan meningkatnya harapan – harapan yang tidak terpenuhi atau terakomodasi dalam suatu sistem politik (suatu masyarakat atau negara). Frustrasi menimbulkan perasaan tertindas oleh kelompok lainnya atau oleh pemerintah. Dengan demikian berlansunglah konflik, termasuk konflik dengan menggunakan kekerasan.¹⁶

¹⁵ Koentjoroningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1979: hlm. 169

Reintegrasi merupakan salah satu upaya untuk menyelesaikan konflik antar kelompok maupun masyarakat. Disamping itu menurut Lederach,¹⁷ inti dari reintegrasi adalah bagaimana membangun silaturahmi sosial dan kepercayaan interpersonal, sebuah upaya untuk membangun kepercayaan kembali bagi masyarakat maupun kelompok yang bertikai dan bermusuhan.

Disamping itu menurut Leo Agustino¹⁸. Konflik sebagai manifestasi dari berbagai sebab frustrasi, rasa tidak aman, rasa takut, tidak adanya keseimbangan antara harapan dan kenyataan, dan sebagainya, serta bisa berwujud sebuah tindakan kekerasan terhadap orang lain, kelompok lain, atau etnis lain yang dapat terjadi di setiap daerah, kawasan dan negara-negara di dunia. Jika tidak dikelola secara baik konflik dapat menjadi bahaya laten dan memiliki siklus kekerasan yang sukar untuk diselesaikan. Akumulasi konflik seringkali dimanifestasikan dalam perilaku untuk menuntut keadilan dan kebenaran demi mencapai suatu tujuan tertentu. Namun demikian, dalam mengupayakan pengendalian konflik, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu misalnya dengan bersikap saling menghormati, berbagi kekuasaan, pemilihan umum, otonomi atau federasi, intervensi asing, sanksi atau juru damai, pengelolaan konflik, dan sebagainya.

¹⁷ Dimas Rahim : *Aceh Nir reintegrasi dan Nir-partisipasi*. Kompas, tgl 7 Juli 2006.

¹⁸ CSIS, *op. cit.*, hlm 254.

2. Melakukan pengawasan terhadap pengeluaran anggaran oleh Badan Pelaksana BRDA yang berasal dari APBN.

3.2. Peran BRDA:

Badan Reintegrasi Damai Aceh mempunyai peran adalah bagaimana mewujudkan dan menjaga berlansungnya perdamaian di Nangroe Aceh Darussalam. Karena itu, Badan Reintegrasi Damai Aceh mempunyai tanggung jawab yang berat, artinya untuk menciptakan perdamaian di NAD sangat tergantung sejauhmana proses reintegrasi berjalan dengan baik di Aceh. Disamping itu juga tidak menutup kemungkinan akan timbulnya kembali konflik baru di Aceh jika dalam proses reintegrasi tidak dijalankan dengan baik dan sungguh – sungguh dilaksanakan, baik itu berupa konflik vertikal antara masyarakat dan pemerintah maupun konflik horizontal antara masyarakat dengan masyarakat di NAD.

Dalam proses reintegrasi di Aceh, pemerintah membentuk sebuah lembaga untuk mempercepat proses reintegrasi bagi masyarakat korban konflik, tabanan politik yang mendapat amnesti dan para anggota kombatan GAM kedalam masyarakat. Secara umum tugas Badan Reintegrasi Damai Aceh adalah bagaimana menciptakan kondisi masyarakat Aceh yang adil,

E. DEFINISI KONSEPSIONAL

Yang dimaksud dengan definisi konseptual adalah suatu usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian antara satu konsep dengan konsep yang lain agar tidak terjadi kesalahpahaman. Definisi konseptual yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Peran

Aktivitas individu dalam suatu lembaga yang melakukan tugas utamanya, atau suatu konsep tentang perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu atau organisasi dalam masyarakat.

2. Reintegrasi

Proses reintegrasi adalah bagaimana membangun dan mengembalikan keadaan yang selama ini menimbulkan konflik dan mengembalikan kepercayaan serta menjalin relasi sosial dimasyarakat yang sudah lama terputus kearah yang lebih baik. Selain itu proses reintegrasi juga bertujuan bagaimana membangun dan menjalin komunikasi antara pihak – pihak yang selama ini bertikai dengan cara-cara damai dan lebih bermartabat untuk mewujudkan kepentingan bersama.

3. Badan Reintegrasi Damai Aceh (BDRA)

Badan Reintegrasi Damai Aceh adalah sebuah lembaga yang dibentuk

F. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional dalam penelitian ini lebih difokuskan pada bagaimana peran Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRDA) Aceh dalam proses reintegrasi di Aceh pasca penanda tangan nota kesepahaman damai antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Peranan Badan Reintegrasi Damai Aceh dapat kita lihat melalui tugas, fungsi dan tanggungjawab seperti yang tertuang dalam SK Gubernur NAD No. 330/106/2006 tentang pembentukan Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRDA), diantaranya:²¹

1. Tugas

Menurut SK Gubernur Nangroe Aceh Darussalam BRDA mempunyai beberapa tugas, diantaranya:

1. Reintegrasi dibidang Ekonomi :
 - a. Membuat dan menjalankan Strategi, Kebijakan, Program dan Prosedur pemberdayaan ekonomi untuk korban konflik.
 - b. Melaksanakan pemberdayaan ekonomi kepada :
 1. Mantan TNA
 2. Mantan Tapol/Napol
 3. Gam non TNA
 4. GAM yang menyerah pra MoU
 5. Relawan PETA.

²¹ *op. cit.* Dokumen BRDA.

2. Reintegrasi dibidang Sosial Budaya :

a. Membuat strategi, Kebijakan, Program dan Prosedur dalam proses reintegrasi. Bantuan Sosial Budaya terdiri dari :

1. Bantuan Dityat
2. Bantuan Rumah
3. Cacat Akibat Konflik
4. Bantuan Kekerasan

3. Reintegrasi dibidang Data dan Monetoring Evaluasi :

1. Mengumpulkan dan mengolah data korban konflik
2. Memonitoring dan mengevaluasi implementasi program Koordinator Bidang Ekonomi dan Koordinator Bidang Sosial Budaya BRDA Kab/Kota.²²

2. Fungsi

Dalam menjalankan program-program reintegrasi, BRDA memiliki beberapa fungsi, diantaranya :

- a. BRDA melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan reintegrasi Aceh menuju perdamaian yang berkelanjutan..
- b. Mengkoordinir perencanaan dan pelaksanaan antar lembaga pemerintah dan non pemerintah baik domestik maupun asing

1. Menjaga dan membangun perdamaian yang permanen di NAD.
2. Merealisasikan program-program reintegrasi.
3. Menyakukan dana-dana bantuan kepada masyarakat yang menjadi kelompok sasaran dari program reintegrasi dengan tranparan dan tepat sasaran.

BRDA memiliki beberapa tanggungjawab diantaranya;

Dalam menjalankan program reintegrasi di Nangroe Aceh Darussalam

3. Tanggungjawab

- a. Mengkoordinir dan memantau pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di kabupaten/kota agar realisasi program sejalan dengan upaya pemenuhan kesepakatan MoU.
 - b. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan – kegiatan yang telah disepakati.
 - c. Mengkompilasi dan mendistribusi laporan atas realisasi program yang dilakukan oleh masing – masing lembaga pelaksana (BRDA) kepada instansi terkait (Pemerintah).
 - d. Mengkoordinir dan memantau pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di kabupaten/kota agar realisasi program sejalan dengan upaya pemenuhan kesepakatan MoU.
 - e. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan – kegiatan yang telah disepakati.
 - f. Mengkompilasi dan mendistribusi laporan atas realisasi program yang dilakukan oleh masing – masing lembaga pelaksana (BRDA) kepada instansi terkait (Pemerintah).
- untuk melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dalam rangka reintegrasi di NAD sesuai dengan MoU Helsinki.

G. METODOLOGI PENELITIAN.

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif yang lebih menitik-beratkan untuk memahami dan menjelaskan situasi tertentu, bukan hanya mencari sebab-akibat dari fenomena yang diteliti. Tujuan penelitian biasanya menjadi alasan dari pelaksanaan penelitian.

Moh. Nasir mengatakan bahwa penelitian deskriptif dimaksudkan untuk membuat atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.²³

Menurut Hadari Nawawi (1987), Metode deskriptif adalah dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian seperti individu, lembaga, kelompok dan masyarakat pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagainya.²⁴

Selanjutnya Winarno Surachmad mengatakan bahwa ciri-ciri yang terdapat pada penelitian deskriptif ialah:²⁵ pertama, memusatkan pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang atau masalah-masalah aktual. Kedua, data-data yang dikumpulkan pertama-tama disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa.

²³ Moh. Nasir. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 1983. hlm. 105

²⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, 1987, hlm. 63

²⁵ Winarno Surachmad, *Dasar-dasar Penelitian Sosial, Dasar Metode dan Teknik Penelitian*

Pada akhirnya operasional penelitian deskriptif ini berkisar pada pengumpulan data yang selanjutnya disusun, diolah, ditafsirkan dan kemudian data yang telah diolah tersebut diberi makna rasional dengan mematuhi prinsip-prinsip logika untuk memperoleh kesimpulan yang akurat dan kritis.

2. Unit Analisis

Karena penelitian ini menyangkut tentang peran dari BRDA Aceh dalam menjalankan reintegrasi pasca perjanjian damai, maka unit analisisnya adalah pengurus dan orang yang terlibat dalam lembaga Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRDA). Sehingga dapat diketahui faktor yang benar-benar mempengaruhi peranan BRDA dalam proses pengintegrasian di Aceh pasca perjanjian damai antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

3. Data Yang Dibutuhkan

Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tanpa melalui perantara). Data primer dapat juga berupa opini subyek secara individual atau kelompok, meliputi indikator-indikator yang akan diuji pengaruhnya, serta hasil observasi terhadap kegiatan atau kejadian dan hasil pengujian yaitu bagaimana peran BRDA (Badan Reintegrasi Damai Aceh) dalam proses reintegrasi pasca perjanjian damai Pemerintah RI dengan GAM. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak

langsung, artinya melalui media perantara. Data sekunder merupakan pendukung data primer yang diambil dari dokumentasi mengenai lokasi penelitian baik yang dipublikasi maupun yang tidak dipublikasikan.²⁶

Atau dengan kata lain data primer diperoleh melalui wawancara dari kalangan masyarakat, birokrat, tokoh intelektual, Ulama, mahasiswa dan lain-lain yang mengerti dengan permasalahan yang hendak dibahas. Dan data sekunder adalah diperoleh melalui dokumen resmi dan tidak resmi seperti, hasil seminar, berita-berita media, dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah, artikel para analisis dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Natsir, teknik pengumpulan data didefinisikan sebagai prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.²⁷ Sesuai dengan definisi tersebut, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi.

4.1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.²⁸ Dengan observasi dapat menghasilkan data yang lebih rinci mengenai perilaku subyek, benda atau

²⁶ Nur.Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metode Penelitian Bisnis*, BPFE, Yogyakarta, 2000, hlm. 146-147

²⁷ Moh. Natsir, *op.cit*; hlm. 211

²⁸ Moh. Natsir, *op.cit*; hlm. 211

kejadian (obyek). Ada dua teknik observasi yang dapat digunakan pada penelitian terhadap lingkungan sosial yaitu *participant observation* dan *non participant observation*:

Sehubungan dengan penelitian mengenai peran Badan Reintegrasi Damai Aceh dalam proses pengintegrasian pasca perjanjian damai, maka peneliti akan menggunakan teknik *participant observation*. Disini peneliti melakukan observasi dengan melibatkan diri atau menjadi bagian dari lingkungan sosial atau organisasi yang diamati. Melalui teknik ini, peneliti dapat memperoleh data yang relatif lebih banyak dan akurat, karena peneliti dapat mengamati secara langsung perilaku dan kejadian-kejadian dalam lingkungan sosial yang diteliti. Kehadiran peneliti kemungkinan dapat diketahui atau tidak diketahui oleh lingkungan sosial yang sedang diamati. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah kombinasi antara observasi langsung dan wawancara secara formal dan non formal.²⁹

Namun dengan teknik *participant observation* ini, peneliti cenderung dituntut keras untuk menilai lingkungan penelitiannya secara obyektif, tanpa melibatkan perasaan karena dalam hal ini, selain sebagai pengamat, peneliti juga sebagai bagian dari lingkungan yang sedang diamatinya. Dalam hal ini, keterlibatan peneliti yaitu sebagai sasaran dari program reintegrasi pasca perjanjian damai di Aceh.

²⁹ *Wahne Lubiano dan Hartono Siregar, Metode Penelitian Untuk BPPK-Vancouver*

kategori-kategori dan saling dihubungkan. Melalui proses inilah penyimpulan dibuat dengan tujuan untuk memperkuat dan memperluas bukti yang dijadikan landasan.³²

Dalam setiap penelitian deskriptif, maka data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, kemudian dianalisa. Secara tegas, langkah-langkah yang digunakan dalam pengujian hipotesa yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:³³

- a. Pengumpulan data.
- b. Penilaian data.
- c. Penafsiran data.
- d. Penyimpulan data.

Berawal dari usaha pengumpulan data-data yang diperlukan, yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, selanjutnya dilakukan penilaian data. Penilaian data dilaksanakan berdasarkan prinsip validitas dan reabilitas, penafsiran atau interpretasi data, artinya memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola dan mencari hubungan antara berbagai konsep. Penafsiran setidaknya adalah menyusun data, sebagai usaha memilih dan menggolongkan data dalam kategori-kategori tertentu. Setelah data-data tersusun, maka langkah yang akan dilakukan adalah interpretasi untuk menjelaskan arti yang terkandung dalam data, dalam kegiatan ini termasuk pula uji hipotesa.

³² Usman, *Kebijakan Pemerintah Masa Transisi dalam penyelesaian konflik Aceh*. Tesis Pasca Sarjana. (Yogyakarta: UGM 2005): hlm 32:

³³ Dara Amalia, *Peran KYPDA Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi*. Skripsi Sarjana S1 Ilmu Politik. (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik 2005). hlm 27